

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fungsi pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan amanat yang telah dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. yang berkenaan dengan fungsi pendidikan tercermin dalam Pasal 31. Ayat (1) berbunyi bahwa *“Tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran”* dan Ayat (2) menyatakan *“Pemerintah mengusahakan sistem pendidikan nasional”*. Bunyi pasal tersebut merupakan landasan yang sangat kuat bagi pemerintah dalam menata sistem pendidikan nasional yang harus mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana tercermin dalam rancangan keputusan MPR RI. hasil Sidang Umum pada bulan Maret 1998 yang menyatakan bahwa :

“Tujuan pendidikan “mengembangkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. berakhlak mulia. berbudi pekerti luhur. memiliki pengetahuan. keahlian dan keterampilan. sehat jasmani dan rohani. serta berkepribadian yang mantap dan mandiri. juga harus menumbuhkan dan mempertebal rasa cinta tanah air”.

Tujuan pendidikan tersebut dapat diselenggarakan melalui berbagai jenjang pendidikan. salah satu upaya tersebut dilakukan pada jenis dan jenjang Sekolah Menengah Kejuruan. Peranan Pendidikan Menengah Kejuruan dalam tatanan sistem pendidikan nasional di negara kita mempunyai posisi yang strategis. khususnya dalam mengembangkan sumber daya manusia pada bidang kejuruan. hal ini sesuai dengan UU Sistem Pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989 yang juga diatur menurut Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah Bab I Pasal 1 ayat (3) berbunyi : *“Pendidikan Menengah Kejuruan*

adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu". Kemudian Bab II pasal 3 ayat (2) mengatakan bahwa "Pendidikan Menengah Kejuruan mengutamakan persiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta pengembangan sikap profesional". Makna yang tersirat dari rumusan tersebut sekolah kejuruan hendaknya memiliki karakteristik: (1) Pendidikan kejuruan diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki lapangan kerja. (2) Fokus isi pendidikan kejuruan ditekankan pada penguasaan pengetahuan keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang dibutuhkan dunia kerja. (3) Hubungan yang erat dengan dunia kerja merupakan kunci sukses dunia pendidikan kejuruan. (4) Pendidikan kejuruan yang baik adalah responsif dan antisipatif terhadap kemajuan teknologi. (5) Pendidikan kejuruan memerlukan fasilitas sebagai objek latihan untuk memperoleh keterampilan.

Karakteristik Sekolah Menengah Kejuruan di atas menunjukkan bahwa transformasi pendidikan kejuruan harus merupakan replika dunia kerja, sehingga pencapaian keterampilan, kebiasaan berfikir dan etika kerja dapat terbentuk sesuai dengan tuntutan dunia kerja sebagaimana dikemukakan Charles Prosser (1925 : 34) "pendidikan kejuruan akan efisien jika lingkungan dimana siswa dilatih merupakan replika lingkungan, dimana ia akan bekerja " selanjutnya Charles Prosser (1925 : 34) mengatakan bahwa "pendidikan kejuruan akan aktif jika dia melatih seseorang dalam kebiasaan berfikir dan bekerja seperti yang dilakukan dalam pekerjaan itu sendiri.

Pernyataan di atas mengandung makna, bahwa dalam pelaksanaan KBM bagi para siswa di sekolah kejuruan memerlukan latihan keterampilan dimana situasi belajar harus merupakan simulasi tuntutan pekerjaan lapangan atau melaksanakan pekerjaan produksi untuk dipasarkan dan layanan jasa bagi konsumen. Loose (1989) berpendapat bahwa lingkungan belajar yang mendukung sekolah kejuruan sbb : (1) Ruang kelas. (2) bengkel sekolah. (3) unit produksi. (4) fasilitas pusat latihan. (5) latihan di industri dan (6) tempat kerja industri.

Pandangan tersebut sejalan dengan karakteristik pelaksanaan PBM di sekolah kejuruan yakni proses belajar yang harus dilaksanakan di sekolah melalui pembelajaran teori di ruang kelas. prakteknya menggunakan bengkel-bengkel latihan milik sekolah. serta mengembangkan praktek kerja yang dilakukan di industri. program diatur sedemikian rupa sehingga relevansi dan kesinambungan proses belajar dapat dipelihara. Praktek kerja di industri selanjutnya dikembangkan menjadi program **“Pendidikan Sistem Ganda”**. Upaya lain yang dikembangkan pemerintah dalam pengembangan dan pembinaan keterampilan bagi siswa dan guru melalui wadah **“Unit Produksi”**.

Pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda di Sekolah Menengah Kejuruan. dilaksanakan atas ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, PP Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 0490/U/1992 tentang sekolah Menengah Kejuruan dan Nomor 080/U/1993 tentang kurikulum.

Ketentuan-ketentuan dan dasar Hukum tersebut dirumuskan menjadi konsep untuk penyelenggaraan sistem ganda sebagaimana dikemukakan Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan (1994 : 7).

“Sistem Ganda adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian kejuruan, yang memadukan secara sistematis dan sinkron program pendidikan disekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung pada bidang keahlian yang relevan untuk mencapai penguasaan kemampuan keahlian tertentu”

Pengertian tersebut tersirat bahwa yang menjadi fokus perhatian adalah program penguasaan keterampilan dan keahlian yang diperoleh dari hasil pengalaman belajar praktek langsung pada bidang pekerjaan yang relevan, yang diselenggarakan atas hasil kerja sama antara pihak sekolah dan industri pasangan.

Lebih jelasnya tujuan Pendidikan Sistem Ganda ini dinyatakan DPMK (1994 : 7).

- (1) Menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas, yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan pekerjaan.
- (2) Memperkokoh Link and Match antara SMK dan dunia kerja.
- (3) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja berkualitas, dan
- (4) Memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan.

Pada tujuan item kedua dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan PSG perlu adanya jalinan kerja sama yang akan menjadi Institusi pasangan dalam pelaksanaan PSG di sekolah sebagaimana dikemukakan DPMK (1994 : 14).

“Sistem Ganda hanya mungkin dapat dilaksanakan, apabila ada kesediaan dan kemauan industri/perusahaan untuk menjadi pasangan SMK dalam melaksanakan bersama program pendidikan dengan Sistem Ganda, karena itu dituntut kemauan dan kemampuan SMK untuk berinisiatif mendekati serta mendapatkan industri/perusahaan untuk menjadi pasangannya”.

Upaya menjalin kerja sama antara pihak sekolah dengan industri ternyata sering menjadi kendala utama pihak sekolah. variasinya potensi wilayah dengan jurusan-jurusan yang ada di SMKTI. memaksa sekolah untuk lintas wilayah dalam menjaring mitra kerja/institusi pasangan. Sehingga kondisi tersebut berdasarkan hasil penelitian awal penulis melalui pengamatan di wilayah Jawa Barat, diperoleh informasi adanya kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PSG antara lain:

- (1) Daya tampung industri untuk pelaksanaan PSG tidak sebanding dengan jumlah siswa. terlebih setelah terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan banyak perusahaan yang mengurangi produksi bahkan berhenti sama sekali sangat berpengaruh terhadap daya tampung pelaksanaan PSG. Dari data yang dikemukakan DPMK (1996 : 12) :
 “Jumlah kesempatan yang tersedia untuk berpraktek-kerja di lapangan kerja masih sangat sedikit (baru 62.487) bila dibanding dengan populasi siswa SMKTI Negeri dan Swasta yang membutuhkannya (sebanyak 1. 58 juta siswa). Artinya, masih kurang dari 4% siswa SMKTI yang telah menikmati kesempatan untuk berpraktik-kerja dalam rangka PSG.
- (2) Sulitnya mencari institusi pasangan yang memenuhi kriteria dan karakteristik pelaksanaan PSG. mengakibatkan Kepala Sekolah secara sporadis mengambil langkah pelaksanaan PSG “asal jalan”.
 - (a) PSG dilaksanakan di bengkel produksi/jasa dengan fasilitas yang dimiliki dari segi kualitas dan kuantitas, lebih memenuhi syarat kepunyaan sekolah.
 - (b) Karakteristik pelaksanaan PSG khususnya untuk aspek yang berkaitan dengan sinkronisasi program monitoring dan evaluasi belum terlaksana secara optimal.

Melihat kondisi dan kendala di atas, maka dalam pembelajaran keterampilan bagi para siswa masih memerlukan alternatif-alternatif lainnya, diantaranya melalui kegiatan Unit Produksi. Pengembangan Unit Produksi bertujuan untuk memberikan pengalaman praktek kerja nyata bagi siswa sekolah kejuruan sehingga lulusannya diharapkan memiliki keterampilan bekerja mendekati tuntutan dunia usaha dan memiliki jiwa wiraswasta.

Merujuk kepada dasar Hukum dan tujuan Unit Produksi dalam rangka menghasilkan dan membentuk tenaga yang mempunyai keterampilan, dan beretika dan wawasan industri mempunyai kesamaan tujuan dengan pelaksanaan PSG, hal ini sejalan dengan rumusan DPMK (1994 : 13) "Bahwa Unit Produksi dapat berperan mensubstitusi kesempatan praktek industri sesuai dengan tuntutan pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda".

Dari kedua upaya yang telah dilakukan pemerintah ternyata belum memberikan solusi pemecahan masalah, sehingga mutu lulusan seperti yang diharapkan masih tetap rendah. Krisis ekonomi juga telah menimbulkan berbagai dampak dalam tatanan dan pelaksanaan pendidikan termasuk pendanaan dari pemerintah untuk biaya operasional sekolah kejuruan akan semakin berat, daya tampung pelaksanaan PSG makin terbatas karena perusahaan/industri sebagai mitra kerja SMK banyak yang mengurangi produksi bahkan berhenti sama sekali. Unit Produksi merupakan salah satu wadah kegiatan yang programnya selaras dengan dunia usaha, dinamis dan kreatif terhadap kondisi dan perkembangan dunia usaha/industri serta mampu menempa siswa tidak bergantung kepada kesempatan kerja yang ada di instansi, perusahaan milik negara, tetapi juga

membentuk tamatan berjiwa wiraswasta, kreatif dan inovatif, dengan pembiayaan relatif lebih murah, efisien dan tepat sasaran. Unit Produksi di sekolah yang sudah terlaksana dengan baik dapat mendukung pelaksanaan PSG dan berfungsi ganda yakni sebagai tempat melatih keterampilan guru dan siswa, tempat memproduksi, membentuk wawasan wiraswasta, etos kerja serta sekaligus sebagai wadah untuk menggali sumber dana untuk mendukung pelaksanaan praktek dan kesejahteraan guru.

B. Masalah Penelitian

Kebijakan Program Pembinaan dan Pengembangan DPMK jangka menengah (2000-2004), dalam rangka peningkatan mutu dan relevansi dengan kebutuhan lapangan, maka setiap SMKTI Negeri sudah didukung oleh potensi yang memadai yakni fasilitas, sumber daya manusia dan permodalan, diharapkan dapat melaksanakan kegiatan Unit Produksi. Namun demikian dalam pelaksanaannya Unit Produksi di SMK Negeri kelompok Teknologi Industri (SMKTI), yang jurusannya terdiri dari: Bangunan, Listrik, Elektronika, Teknologi pengerjaan logam, dan Otomotif sangat bervariasi. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan potensi wilayah, potensi sekolah dan bidang garapan unit produksi, serta strategi pengelolaan yang dilakukan oleh masing-masing sekolah. Secara umum pelaksanaan unit produksi di SMK kemajuannya lamban sebagaimana Dikemukakan Direktur DPMK (1999 : 5)

“Banyak faktor yang mempengaruhi kelambanan tersebut, diantaranya : belum tertanamnya wawasan bisnis di SMK, langkanya sumber daya manusia yang mampu dan sanggup melaksanakan unit produksi, dan kurangnya dukungan dari pihak pengelola SMK”.



Gambaran tersebut sudah sejalan dengan hasil evaluasi tim monitoring tahunan oleh DPMK yang pelaksanaannya melibatkan beberapa PPPG di provinsi tersebut. Gambaran bahwa unit produksi SMK belum dikelola secara profesional, karena kemampuan tenaga pengelola dan pelaksana belum memadai untuk mengembangkan unit produksi yang bersifat bisnis. Padahal jika unit produksi ini dikelola secara profesional mempunyai peran yang sangat strategis sebagaimana dikemukakan DPMK (1999 : 5).

“Jika Unit Produksi dikelola secara profesional, hasilnya akan memiliki keuntungan berlipat ganda, yakni mensejahterakan warganya, memperbaiki dan memajukan fasilitas sekolah, relevansi program kejuruan dengan kebutuhan DU/DI, dan yang lebih penting menyiapkan siswa berlatih kerja secara nyata dan bertanggung jawab, karena hasilnya bakal dijual dipasaran umum”.

Secara umum pelaksanaan Unit Produksi di seluruh SMK pada tingkat Nasional mempunyai kendala yang relatif sama, yakni kendala-kendala yang berkaitan dengan potensi sekolah, potensi wilayah, strategi pengelolaannya, karakteristik jurusan serta bidang garapan kegiatan Unit Produksi yang dilaksanakan di SMK.

Bertolak dari uraian tersebut, menarik perhatian penulis untuk melakukan studi berkenaan dengan pelaksanaan Unit Produksi di lingkungan SMKTI Negeri dan BLPT masalahnya dirumuskan sebagai berikut :

“Dalam hal apakah Manajemen Unit Produksi di Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Industri Negeri 6 dan Balai Latihan Pendidikan Teknik Bandung menunjang pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda”.

Fokus masalah tersebut dirinci menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Profil Unit Produksi di SMKTI Negeri 6 dan BLPT Bandung dibentuk ?

Pertanyaan penelitian tersebut dirinci sebagai berikut:

- a. Apa dan bagaimana visi, misi serta tujuan Unit Produksi ?
 - b. Bagaimana kekuatan, kelemahan serta peluang dan ancaman pelaksanaan Unit Produksi ?
 - c. Strategi dan pendekatan apa yang digunakan dalam pelaksanaan Unit Produksi ?
2. Bagaimana struktur, mekanisme organisasi dan aliran wewenang anggota yang terlibat dalam Unit Produksi di SMKTI Negeri 6 dan BLPT Bandung ?

Pertanyaan penelitian dirinci sebagai berikut :

- a. Bagaimana struktur organisasi Unit Produksi SMKTI Negeri 6 dan BLPT Bandung.
 - b. Bagaimana mekanisme, wewenang dan uraian tugas pengelola Unit Produksi.
3. Bagaimana perencanaan Unit Produksi di SMKTI Negeri 6 dan BLPT Bandung?

Pertanyaan penelitian tersebut dirinci sebagai berikut :

- a. Bagaimana proses perencanaan penggunaan sumber daya yang digunakan dalam Unit Produksi ?
 - b. Bagaimana perencanaan strategi pemasaran dilakukan ?
 - c. Bagaimana perencanaan pengaturan keterkaitan proses produksi dengan program pendidikan sistem ganda ?
 - d. Bagaimana sistem pembagian pendapatan Unit Produksi ?
4. Bagaimana pelaksanaan Unit Produksi di SMKTI Negeri 6 dan BLPT Bandung ?

Pertanyaan penelitian tersebut dirinci sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan penggunaan sumber daya yang digunakan dalam Unit Produksi, menyangkut alat, bahan dan permodalan ?
 - b. Bagaimana pelaksanaan pengaturan proses produksi dilakukan ?
 - c. Bagaimana pelaksanaan strategi pemasaran dilakukan ?
 - d. Bagaimana pelaksanaan pengaturan hasil keuntungan yang diperoleh ?
 - e. Bagaimana pelaksanaan pengaturan keterkaitan proses produksi dengan program pendidikan sistem ganda ?
 - f. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Unit Produksi :
5. Bagaimana pengawasan dan evaluasi Unit Produksi di SMKTI Negeri 6 dan BLPT Bandung ?



Pertanyaan penelitian tersebut dirinci sebagai berikut :

- a. Siapa dan bagaimana proses pengawasan dilaksanakan terhadap kegiatan Unit Produksi ?.
 - b. Apakah pengelola dan pelaksana Unit Produksi menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien sebagai upaya peningkatan kualitas hasil kerja ?
 - c. Apakah hasil pengawasan penilaian dijadikan bahan pembinaan dan pengembangan kegiatan Unit Produksi dalam peningkatan kualitas produk dan layanan terhadap konsumen ?
6. Bagaimana pengembangan dan peningkatan kualitas Unit Produksi di SMKTI Negeri 6 dan BLPT Bandung untuk mendukung pelaksanaan PSG?

Pertanyaan penelitian tersebut dirinci sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pengembangan sumber daya produksi dalam peningkatan kualitas pelaksanaan unit produksi ?
- b. Langkah-langkah apakah yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan UP ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

a. Secara Umum

Untuk mendapatkan gambaran pengelolaan dan strategi pengembangan manajemen unit produksi yang menunjang pelaksanaan sistem ganda dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan kejuruan, selaras dengan kebutuhan masyarakat baik industri maupun mandiri.

b. Secara Khusus

Adapun penelitian ini secara khusus adalah untuk menganalisis :

- 1) Manajemen Unit Produksi di SMKTI Negeri 6 dan BLPT
- 2) Organisasi Unit Produksi di SMKTI Negeri 6 dan BLPT
- 3) Perencanaan Unit Produksi di SMKTI Negeri 6 dan BLPT

- 4) Pelaksanaan Unit Produksi di SMKTI Negeri 6 dan BLPT
- 5) Pengawasan dan evaluasi Unit Produksi di SMKTI Negeri 6 dan BLPT
- 6) Strategi pengembangan dan peningkatan kualitas Unit Produksi di SMKTI Negeri 6 dan BLPT untuk mendukung pelaksanaan PSG

2. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Memperdalam kajian administrasi pendidikan. khususnya pengelolaan dan pengembangan potensi sekolah. Baik secara pembuktian teoritis melalui analisis keadaan dilapangan. maupun sebagai harapan adanya pengembangan konsepsi teoritis.

b. Praktis

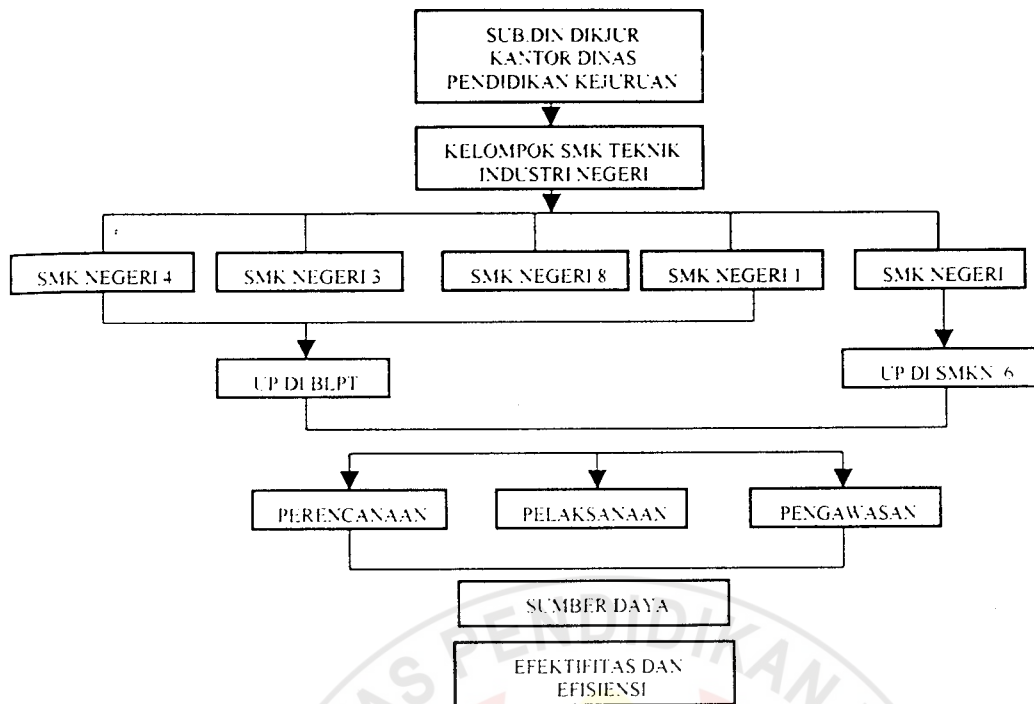
- 1) Hasil analisis pengelolaan dan strategi pengembangan manajemen unit produksi pada SMKTI Negeri bidang keahlian otomotif dan bidang keahlian mesin diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran dan pengkajian lebih mendalam mengenai pengembangan manajemen Unit Produksi sekolah yang di dukung oleh potensi sekolah untuk menunjang Pendidikan Sistem Ganda.
- 2) Sebagai bahan kajian dan masukan kepada Direktorat Pendidikan Kejuruan. melalui Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi (P3GT) Bandung.

Kerangka Berfikir Dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Kerangka Berfikir

Dalam kerangka berfikir lebih difokuskan untuk melihat posisi masalah. Unit Produksi merupakan salah satu bidang garapan yang mempunyai landasan Hukum PP RI No. 29 tahun 1990 dan SK Mendikbud RI No. 0490/U/1992. Sehingga bagi Sekolah Kejuruan Negeri yang fasilitasnya sudah dilengkapi dan memadai diharapkan dapat melaksanakan Unit Produksi. Sebagai indikator kesungguhan pemerintah dalam kegiatan program Monitoring dan Evaluasi Sekolah Kejuruan, keberadaan UP merupakan salah satu kriteria penilaian yang diberlakukan secara Nasional untuk mengukur keberhasilan sekolah, yang dilaksanakan setiap tahun oleh Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan (DPMK).

Unit Produksi di sekolah jika merujuk kepada ketentuan dari DPMK dan Kanwil bisa dilaksanakan secara fleksible, dibawah salah satu Wakasek, umumnya dikelola dan dikembangkan di bawah Wakasek Hubin bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah, begitu juga Unit Produksi yang ada di BLPT Bandung di bawah koordinasi Hubin, yang kemudian struktur organisasinya dikembangkan oleh masing-masing bidang keahlian. Proses pengelolaan Unit Prouksi dilakukan melalui perencanaan kegiatan produksi, pengorganiasian, pelaksanaan produksi dengan menggerakkan sumber daya produksi serta pengawasan terhadap kinerja mutu produksi, sehingga diharapkan pelaksanaan UP efektif dan efisien yang pada akhirnya dapat memberikan konstribusi dalam mendukung PSG.



Gambar 1.1. Struktur Pelaksanaan Unit Produksi SMK Negeri

2. Ruang Lingkup Penelitian

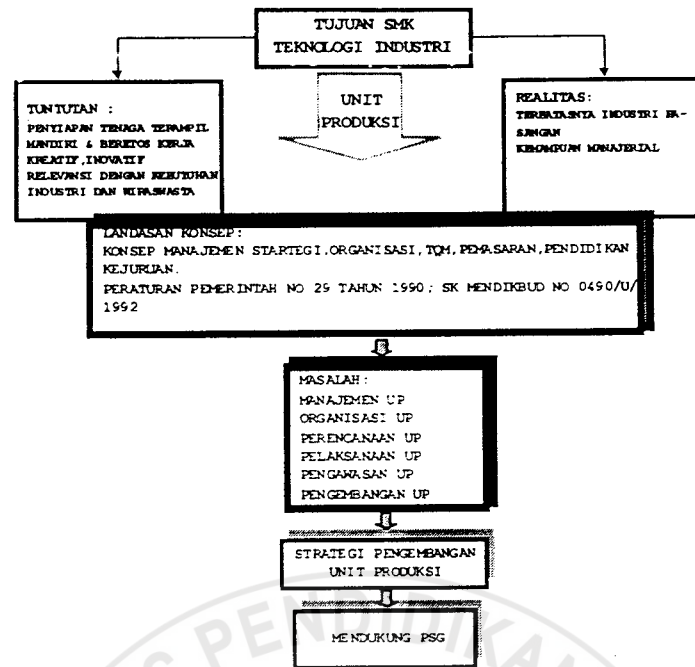
Masalah yang diteliti menjadi landasan berfikir adalah pelaksanaan Unit Produksi dipandang dari manajemen dan kualitas proses serta produk merupakan muara berbagai persoalan yang ada dalam kegiatan Unit Produksi. Seluruh rangkaian kegiatan Unit Produksi perlu direncanakan secara matang untuk jangka panjang maupun pendek, sumber daya manusia, fasilitas serta dana perlu dikelola dengan menerapkan sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan.

Ruang lingkup materi tersebut, maka pendekatan teoritis yang digunakan untuk pemecahan masalah adalah konsep kualitas, Manajemen Strategik, TQM, Dasar Hukum pelaksanaan Unit Produksi dan Pendidikan Sistem Ganda di SMK. Konsep-konsep tersebut menjadi landasan berpikir dan paradigma untuk melihat.

D. Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan kumpulan longgar dari asumsi yang dipegang bersama konsep, atau preposisi yang mengarahkan cara berpikir penelitian. Hal ini sejalan dengan pendapat Bogdan and Biklen (1992:33) bahwa: *Paradigms a loose collection of logically health to gether assumption, concepts or propotitions the orien thinking or research.* Paradigma juga memiliki pengertian sebagai suatu (1) model dalam teori ilmu pengetahuan, dan (2) kerangka berpikir. Paradigma dalam penelitian ini, merujuk pada kerangka pemikiran yang didasarkan pada posisi masalah untuk mengarahkan penelitian. Paradigma penelitian ini diilustrasikan dalam gambar 1.3.

Gambar tersebut memberikan penjelasan yakni suatu aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh nilai tambah berkaitan dengan pemenuhan pelaksanaan PBM di lingkungan SMK Negeri, dengan memanfaatkan fasilitas yang ada melalui kemampuan manajerial pimpinan dan anggota organisasi sekolah.



Gambar 1.3 Paradigma Penelitian

F. Penjelasan Istilah

Ada beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini. untuk memudahkan pemaknaan setiap istilah serta menghindarkan terjadinya salah persepsi dari para pembaca di bawah ini dijelaskan beberapa istilah penting.

1. Strategis dalam konteks pengembangan manajemen, meliputi: (a) *strategic planning*, sebagai dokumen formal dalam pelaksanaan Unit Produksi. (b) *strategic management*, sebagai upaya untuk mengelola proses Unit Produksi. dan (c) *strategic thinking*, sebagai kerangka dasar untuk menilai kebutuhan, merumuskan tujuan dan hasil-hasil yang ingin dicapai secara berkesinambungan dalam Unit produksi.
2. Unit Produksi (UP) adalah satu unit usaha yang ada dan dikembangkan dalam struktur organisasi sekolah yang berperan untuk memberikan

kesempatan kepada siswa dan guru melaksanakan kegiatan produksi barang dan layanan jasa perbaikan menggunakan sumber daya yang dimiliki sekolah sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan, membentuk etika kerja serta wawasan ekonomi bagi guru dan siswa.

3. Pendidikan Sistem Ganda (PSG) Sistem ganda merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian kejuruan yang memadukan secara sistematis dan sinkron program pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja yang relevan untuk mencapai penguasaan kemampuan tertentu.
4. Sekolah Menengah Kejuruan adalah sekolah dalam lingkup kejuruan yang tujuannya untuk mengembangkan kemampuan siswa untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Tujuan tersebut lebih ditegaskan dalam PP No. 29 tahun 1990 BAB II Pasal 3 ayat 92). menyatakan bahwa “Pendidikan Menengah Kejuruan mengutamakan persiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta pengembangan sikap profesional”. Sedangkan Sekolah Menengah Kejuruan Kelompok Teknologi Industri (SMKTI) merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan yang bidang keahliannya meliputi : Bangunan, Elektronika, Listrik, Mesin dan Otomotif.
5. Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT), merupakan institusi di bawah Kantor Dinas Wilayah disiapkan sebagai tempat praktek secara terpusat bagi Sekolah Menengah Kejuruan Kelompok Teknologi Industri bidang keahlian Bangunan, Elektronika, Listrik, Mesin dan Otomotif yang tidak mempunyai fasilitas praktek di sekolahnya.

